

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT KOTA PADANG PADA PEMILU  
KEPALA DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**OLEH:**

**RANI WILLI ASTUTI**

**BP. 06193114**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2011**

## ABSTRAK

**RANI WILLI ASTUTI, 06 193 114, Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang Pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat tahun 2010, dibimbing oleh Pembimbing I Drs. Wahyu Pramono, Msi dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP, M.PP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2011, 105 hal, 6 buku, 7 skripsi, 3 artikel internet, 3 undang-undang.**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana untuk penyaluran aspirasi rakyat terhadap pemerintahan dengan diadakannya pemilu. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan yang akan memimpin mereka sebagai presiden di lembaga eksekutif lima tahun kedepan, disini juga termasuk para pejabat lokal atau kepala daerah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku memilih dengan menggunakan 2 variabel mazhab psikologi yaitu orientasi kandidat dan identifikasi kepartaian. Penelitian ini melihat hubungan perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada pemilihan kepala daerah Sumatera Barat tahun 2010 dengan orientasi kandidat dan identifikasi kepartaian. Konsep yang digunakan adalah perilaku memilih, orientasi kandidat, dan identifikasi kepartaian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian penjelasan (*explanatory research*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuisioner, sedangkan analisa menggunakan program SPSS 15.00 dengan analisis data Coeffisient Contingensy.

Berdasarkan data yang didapat dilapangan diketahui bahwa hubungan antara perilaku memilih dengan orientasi kandidat adalah lemah, dan hubungan antara perilaku memilih masyarakat dengan identifikasi kepartaian juga lemah.

*Kata kunci: Perilaku Memilih Masyarakat, Orientasi Kandidat, Identifikasi Kepartaian*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara demokratis, dimana di dalam suatu negara yang demokratis tersebut terdapat kedaulatan rakyat yang diwujudkan dengan melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan suatu ajang bagi rakyat untuk menyalurkan pendapat mereka tentang siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih untuk mengayomi kehidupan negara ini beberapa tahun ke depan. Dalam pemilu masyarakat dapat bebas menyalurkan pendapat mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana untuk penyaluran aspirasi rakyat terhadap pemerintahan dengan diadakannya pemilu. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan yang akan memimpin mereka sebagai presiden di lembaga eksekutif lima tahun kedepan, disini juga termasuk para pejabat lokal atau kepala daerah.

Pemilihan umum (pemilu) di [Indonesia](#) pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu [DPR](#), [DPRD Provinsi](#), dan [DPRD Kabupaten/Kota](#). Setelah amandemen keempat [UUD 1945](#) pada [2002](#), pemilihan [presiden](#) dan [wakil presiden](#) (pilpres), yang semula dilakukan oleh [MPR](#), disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada

Pemilu 2004. Pada [2007](#), berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada), sekarang disebut Pemilu kada yang dilaksanakan pada tingkat lokal memberi kesempatan pada masyarakat suatu daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam melaksanakan pemerintahan lokal dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah tersebut. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah [pemilihan umum](#) untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di [Indonesia](#) oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah: [Gubernur](#) dan wakil gubernur untuk [provinsi](#), [Bupati](#) dan wakil bupati untuk [kabupaten](#), [Walikota](#) dan wakil walikota untuk [kota](#). Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang [Pemerintahan Daerah](#). Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim [pemilihan umum](#) (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni [2005](#).

Pilkada diselenggarakan oleh [Komisi Pemilihan Umum](#) (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh [Panitia Pengawas Pemilihan Umum](#)

(Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Perubahan Pilkada menjadi Pemilu Kada terjadi pada tahun 2010. Pelaksanaan Pemilu Kada akan berbeda dengan Pilkada tahun 2005 lalu, perbedaan tersebut mengacu kepada undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang No. 32 tahun 2004 yang memberi ruang terhadap calon perorangan (Independen) dalam pencalonan kepala daerah. Pilkada 2005 masih mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana calon Kepala Daerah hanya berasal dari kalangan partai politik saja, sedangkan Pemilu Kada pencalonan bisa dari perorangan.

## **BAB VII**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan terhadap perilaku memilih masyarakat kota Padang pada pemilu kepala daerah Sumatera Barat pada tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan orientasi kandidat dan identifikasi kepartaian memiliki hubungan terhadap perilaku memilih masyarakat.

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa variabel orientasi kandidat mempunyai hubungan yang lemah dengan perilaku memilih masyarakat kota Padang pada Pemilu kepala daerah Sumatera Barat tahun 2010. Pada umumnya responden cukup mengenal pasangan kandidat yang mengikuti pemilihan. Masyarakat mengenal kandidat berdasarkan visi misi, kepopuleran kandidat. Tetapi masyarakat hanya mengetahui pasangan yang mereka pilih saja dan juga kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan visi misi yang mereka janjikan masih belum maksimal, kebanyakan responden tidak percaya terhadap janji politik kandidat tersebut.

Variabel kedua yaitu identifikasi kepartaian mempunyai hubungan kategori lemah dengan perilaku memilih masyarakat kota Padang pada pemilu kepala daerah Sumatera Barat tahun 2010. Pada umumnya responden mengetahui partai yang mengusung kandidat tersebut, karena kebanyakan responden tidak memilih partai yang mereka pilih pada pemilu legislative tahun 2009. Disamping itu masyarakat juga tidak terlalu percaya dengan pelaksanaan visi dan misi yang dijanjikan oleh partai tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan terhadap perilaku memilih masyarakat kota Padang pada pemilu kepala daerah Sumatera Barat tahun 2010, maka perlu dilakukan lagi penelitian lebih lanjut mengenai perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada pemilu kepala daerah Sumatera Barat tahun 2010, tidak hanya sebatas orientasi kandidat dan identifikasi kepartaian